

## MANUSKRIP LONTARAK DALAM PATAHAN NARASI KEBUDAYAAN

**MUH. FAISAL**

Dosen Program Studi Pendidikan Seni Rupa  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan studi fenomenologi terhadap praktik-praktik kebudayaan di Sulawesi Selatan. Di dalamnya menguraikan tentang bagaimana masyarakat menginterpretasikan manuskrip lontara sebagai sebuah sistem nilai yang beroperasi melalui praktik kebudayaan di Sulawesi Selatan. Transformasi praktik-praktik kebudayaan melalui informasi dan teknologi membuat wasiat kebudayaan perlu direkonfigurasi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga manuskrip lontara sebagai wasiat kebudayaan mampu mewujudkan identitas peradaban yang luhur dan adaptif pada setiap perubahan sektorial.

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menggunakan pendekatan interpretifisme simbolik Clifford Geertz yang kemudian diadaptasi melalui teori dan paradigma kritis post modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah kebudayaan kini mulai dikubur berdasarkan pertukaran kompleksitas ekonomi, politik, hukum dan agama sehingga sangat sedikit perwujudan kearifan budaya yang melebur ke dalam perilaku sosial, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Hasrat material dan gaya hidup glamour menjadi sistem nilai yang tak mampu lagi menerima wasiat lontarak, dari disini pula terjadi dorongan dan pengaruh mentalitas yang sempit antara nilai-nilai estetika dan etika kebudayaan. Salahsatu metode penyadaran wasiat kebudayaan yang sudah mulai hilang adalah mengangkat kembali falsafah dan nilai-nilai esensi kebudayaan dengan menggunakan pendekatan ontologis, pendekatan mitis dan pendekatan fungsional, agar manuskrip lontara tidak lagi terseret lebih jauh dalam kekuatan naskah kapital. Kekuatan kapital melahirkan patahan-patahan narasi kebudayaan, sehingga wasiat lontarak hanya menjadi pesona manuskrip masa lalu. Tanda budaya tidak lagi mewakili kebenaran, representasi budaya tidak mewakili realitas dan informasi budaya tidak lagi mewakili ilmu pengetahuan.

**Kata kunci :** *Manuskrip lontarak, Narasi kebudayaan.*

## I. PENDAHULUAN

Lontara sebagai sumber sejarah dan falsafah kebudayaan Sulawesi Selatan adalah sebuah wasiat yang berangsur-angsur terkikis dari konteks peradaban kekinian. Khasanah sistem nilai yang meliputinya lambat laun kehilangan sakralitas dalam norma-norma sosial. Padahal wasiat dalam naskah lontara, diuraikan dalam beberapa jenis naskah. Seperti naskah lontara bilang (*peristiwa penting Kerajaan Gowa-Tallo pada abad XVI-XVIII*), lontara pattorioloang (*Sejarah Gowa-Tallo*), Lontara Latoa (*berisi masalah pemerintahan dan tata kehidupan*), Lontara Pau-pau Rikadong (*berisi dongeng pengantar tidur anak*) dan seterusnya sampai pada lontara pattodioloang di Mandar, berikut lontara Sukkuna Wajo yang digunakan sebagai perbandingan milik Datuk Sangaji Wajo. Naskah tersebut memiliki orientasi nilai yang sepertinya berbeda dengan orientasi sistem nilai saat ini.

Harus diakui bahwa kompleksitas sistem nilai dan norma-norma kebudayaan saat ini telah mengalami degradasi naratif. Prilaku hedonis, instan, materialistik dan individualis seolah-olah mempertegas hadirnya *syncretism culture*, dalam tinjauan terminologi yaitu hilangnya kebudayaan lokal dan munculnya kebudayaan baru. Carut marutnya prilaku kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa berimplikasi dari sistem nilai dan norma-norma yang telah melekat dalam falsafah hidup masyarakat kita. Konflik kepentingan sosial, lemahnya sistem hukum dan kerancuan etika politik telah menjadi hidangan keseharian bangsa ini, tanpa disadari bahwa kita telah melupakan falsafah kebudayaan dan kearifan lokal yang diwasiatkan para leluhur sebagai sebuah sistem yang bermartabat. Wasiat kebudayaan

tentu tidak hadir begitu saja, tetapi lahir berdasarkan hierarki histories kehidupan pada masa lampau. Pranata sosial saat ini sejatinya menilik tatanan kebudayaan yang sarat dengan falsafah adat istiadat, agar kesalahan sejarah tidak terulang dalam kehidupan saat ini.

## II. Mengenal Wasiat Panggadereng

Mattulada dalam '*Latoa*' mengisyaratkan tentang pranata sosial masyarakat Sulawesi Selatan yang disebut dengan *panggadereng* (bahasa Bugis) dan *pangngaadakkang* (bahasa Makassar). Pranata sosial dalam *panggadereng* yang dimaksud meliputi; *Adak* (adat kebiasaan), *Rapang* (persamaan hukum), *Bicara* (undang-undang), *Wari* (pelapisan dan status sosial) dan *sarak* (syariat). Sebagaimana halnya struktur pemerintahan kerajaan, maka unsur-unsur *pangadakkang* pun yang telah ada sebelumnya tetap berlanjut setelah Islam diterima sebagai agama negara. Islam hanya memperkaya dengan menambahkan satu unsur yang disebut *Sarak* (syariat). Sebagai pranata Islam, *sarak* diakui sebagai salah satu unsur penyempurnaan struktur pemerintahan Sulawesi Selatan pada masa lampau. Penerimaan Islam sebagai agama resmi negara merupakan babak baru dalam peradaban di kebudayaan di Sulawesi Selatan, setelah beberapa periode pemerintahan tidak ditemukan perubahan yang mendasar. Sayangnya, kompleksitas kebudayaan yang mengikat lima sistem sosial tersebut di atas seolah-olah telah ditinggalkan oleh peradaban kebudayaan kekinian. Padahal jika ditelusuri berdasarkan falsafah kebudayaan, *panggadereng* merupakan sistem nilai dan norma-norma masyarakat dalam menjalankan hubungan kolektivitas. Sebuah hubungan interaksi sosial-budaya

yang membentuk harmonisasi, yaitu serangkaian khasanah kebudayaan lokal yang senantiasa menekankan aspek kesantunan, etika politik, penegakan maupun kesamaan hukum dan penanaman nilai spiritualitas masyarakat. Sistem *panggadereng* merupakan sebuah kompleksitas kekayaan dan kearifan budaya yang tidak hadir begitu saja, tapi terbentuk setelah mampu memecah kebuntuan transformasi sosial (*hierarki historia*). Olehnya, bangunan wasiat *panggadereng* senantiasa menjadi sebuah energi bagi masyarakat apabila kesadaran *micro cosmos* (manusia) terefleksikan melalui pesan-pesan *macro cosmos* (alam). Bahwasanya ada ketentuan-ketentuan alam dan spritualitas yang membangun etika dan moralitas masyarakat, termasuk hadirnya falsafah keseimbangan (*balancing*) dalam sistem kehidupan masa lampau. Falsafah keseimbangan inilah yang senantiasa hilang dalam generasi keilmuan saat ini. Jika di Cina dikenal dengan konsep *Ying Yang* sebagai suatu kompleksitas kehidupan, maka di Bugis-Makassar dikenal dengan konsep Sulapa Appa'. Sebuah wujud kesempurnaan manusia dalam mengungkap rahasia-rahasia alam dan kehidupan.

### III. Distorsi Makna

Dari simplikasi di atas, muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan sistem dan pranata sosial saat ini..?? Pasca kolonialisme, sistem dan pranata tersebut berangsur-angsur mengalami pergeseran dan akulturasi. Peranan sistem demokrasi dan lembaga pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif (*trias politica*) maupun bentuk-bentuk asosiasi sosial lainnya cenderung menanggalkan pesan-pesan wasiat

*panggadereng*. Persekutuan mafia peradilan, hilangnya keteladanan kepemimpinan sampai kepada penjarahan kekayaan bangsa melalui kompetisi korupsi, hanya mampu melebur kedalam kajian-kajian tekstual belaka tanpa diikuti oleh komitmen kolektivitas. Kenapa tidak, pranata dan sistem sosial kita adalah sebuah produk kapital yang meligitimasi kelas-kelas sosial tertentu dalam memenuhi hasrat kekuasaan dan kemudian secara berangsur-angsur diikuti oleh prilaku masyarakat kita. Budaya saling memanusaiakan, saling menghormati dan saling mengingatkan tidak lagi berlaku dalam pementasan politik Bangsa ini, karena yang terbentuk adalah '*politik katak*' yaitu untuk sampai keatas, harus menendang kebawah. Salahsatunya adalah Starategik *black campaign* yang merupakan suatu instrumen penentu keberhasilan dalam memperoleh kekuasaan. Fakta realitas yang terjadi pada bangsa ini telah menjadi sebuah budaya, secara harfiah merupakan suatu *idea*, asumsi maupun interpretasi manusia yang diikuti dengan prilaku sosial. Dari sinilah terjadi distorsi makna *panggadereng* yang menciptakan generasi kapital dan budaya korup.

Menilik wacana tentang falsafah *panggadereng* di atas, tentu bukan suatu upaya formal dalam melakukan perubahan struktural di negeri ini, tapi bagaimana sistem nilai yang mengikat hubungan sosial kita mampu menerjemahkan konsep dan visioner *panggadereng* sebagai formulasi penataan pelayanan publik yang berkeadilan termasuk pembangunan manusia yang berkarakter. Disadari maupun tidak, harus diketahui bahwa ilmu Antropologi pada awal abad ke XX mengalami kemajuan, ilmu Antropologi dipergunakan oleh bangsa Eropa untuk mempelajari adat-istiadat dan kebiasaan

bangsa yang terjajah. Dengan mengetahui data tentang kebiasaan itu dapat dipergunakan untuk mempertahankan kolonialismenya di negara yang dijajah tersebut termasuk Bangsa ini yang kita yakini sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa ini harus menemukan sekaligus mengembalikan wasiat kearifan lokal sebagai sebuah pertahanan arus globalisasi yang di fatwakan oleh Negara-negara berkembang. Karena pada dasarnya globalisasi tidak hanya dipandang sebagai sebuah kompetisi perdagangan bebas, tetapi sejauhmana bangsa ini mampu mempertahankan asset kebudayaan, termasuk *pangngadereng* sebagai sebuah wasiat kebudayaan yang telah hilang.

#### IV. Ancaman Wasiat Lontarak

Wasiat Lontara sebagai naskah historia kebudayaan yang mengandung sistem nilai dan norma kebudayaan, seperti takpelak lagi membendung arus industrialisasi yang menyeret kita pada narasi ekonomi kapital. Prilaku egaliterian merubah menjadi prinsip politik demokrasi, dimana nyanyian-nyanyian sekuler kini meredam energi fanatisme kebudayaan kita. Kecendrungan mengejar pesona materialisme menjadi harga mati dalam memperoleh kuantitas pencitraan publik yang berangsur-angsur melemahkan karakter manusia sebagai manusia. Jika dulu mengabdikan pada kerajaan adalah suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri, sekalipun tidak digaji sama sekali. Karena hal tersebut berimplikasi dari nilai fanatisme kebudayaan yang mengedepankan prinsip-prinsip kepatutan, keamanan dan pencitraan bangsanya. Sedangkan sistem demokrasi saat ini, yang notabene sebagai sebuah pengejawantahan kedaulatan rakyat justru

melahirkan fanatisme sempit yang hanya mengedepankan orientasi kepartaian dalam perebutan kekuasaan. Yang lebih ironis lagi pada saat kekuasaan dan jabatan direbut, maka pengabdian jabatan menjadi peluang terbesar untuk melakukan penjarahan aset Negara, semua dilakukan demi keselamatan kepartaian dan masa depan kekuasaan secara terpadu.

Wasiat kebudayaan kini mengalami pertarungan dalam menciptakan identitas peradaban. Sayangnya, sejarah kebudayaan kini mulai dikubur berdasarkan pertukaran kompleksitas ekonomi, sehingga sangat sedikit perwujudan kearifan budaya saat ini melebur ke dalam prilaku sosial, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Hasrat material dan gaya hidup glamour menjadi sistem nilai yang tak mampu lagi menerima wasiat kebudayaan, dari disini pula terjadi dorongan dan pengaruh mentalitas yang sempit antara nilai-nilai estetika dan etika kebudayaan.

#### V. Konsep *Tau* Dalam Kebudayaan Sul-Sel

'*Tau*' atau '*To*' dalam terminologi Bugis-Makassar adalah manusia, dalam perspektif kebudayaan Sulawesi Selatan dianjurkan memiliki *sipa' tau* (sifat manusia). Artinya bahwa karakteristik sifat manusia harus merujuk pada sistem nilai dan norma-norma masyarakat Sulawesi Selatan. Konsep '*tau*' dalam kebudayaan ini merupakan spirit dalam memperoleh wujud kesempurnaan manusia yang biasa di simbolkan sebagai *sulapa appa walasuji* (segi empat belah ketupat) yang menurut Mattulada dapat juga disimbolkan dengan huruf aksara lontara

yaitu 'sa' yang dapat di artikan sebagai *dewata seuwae* (Tuhan Yang Maha Esa). Dalam sistem kebudayaan disebutkan: "Nikanaya sulapak appakna taua iami antu niak sirikna, niak paccekna, niak pangngalikna, na todong pangngadakkangna". Artinya : Yang disebut manusia berhati 'sulapa appa' yaitu manusia yang memiliki harga diri, memiliki rasa kesetiakawanan, menghargai orang lain dan memiliki sifat sopan santun. Dari simplikasi tersebut maka ditemukan bahwa konsep 'tau' di Sulawesi Selatan pada dasarnya berimplikasi dari konsep 'sulapa appa', yang dapat diperoleh dari 'magguru' (belajar) dan *massompe* (merantau). Implementasi konsep tersebut menghantarkan perilaku *sipakatau* (saling memanusiaikan), *sipakalebbi* (saling memuliakan), *sipakatuo* (saling menghidupi), dan *sipakatokkong* (saling membantu). Sehingga jelas bahwa falsafah tersebut selain sebagai wasiat kebudayaan, juga menjadi sebuah sistem nilai dalam pedoman hidup masyarakat Sulawesi Selatan. Olehnya, wajar kemudian masyarakat Sulawesi Selatan dikenal memiliki keunggulan diaspora (*menyebarkan dan hidup mandiri*). Tidak sedikit masyarakat Sulawesi Selatan mencapai keberhasilan dan kesuksesan di luar. Mereka berpijak pada prinsip-prinsip yang dianutnya sebagai sebuah falsafah hidup. Namun demikian bukan berarti semua berhasil, ada juga diantara beberapa diantaranya yang melebur dalam kehidupan yang justru memalukan (*mappakasiri*). Olehnya dituntut untuk memiliki konsep hidup sebagai sebuah falsafah kebudayaan; yaitu: *warani* (berani), *lempu* (jujur), *sugi* (kaya) dan *acca* (pintar).

Dalam konsepsi Makassar tentang 'tau' adalah: "Antu nikanaya tau akrupa – rupai. Niak tau, tau tojeng. Niak tau poro tau. Niak

*tau, akkanaji natau*". Artinya : "Manusia itu bermacam – macam. Ada manusia, benar – benar manusia. Ada manusia sekedar manusia. Ada manusia dikatakan manusia karena ia dapat berbicara." Dalam tulisan ini, maka dapat di uraikan bahwa konsep manusia merupakan stimulus kebudayaan yang senantiasa membuktikan kesempurnaan eksistensinya dan sejauhmana mereka mampu menafsirkan sistem kebudayaan yang tidak sertamerta bergeser pada sistem kebudayaan yang telah dilebur dari luar (*akulturasi culture*).

## VI. 'Tau' dalam Konteks Kekinian

Kompleksitas kehidupan sosial dewasa ini telah mengalami titik kulminasi, dimana kebutuhan materi dan kekuasaan menjadi 'produk baru' yang senantiasa *disembah* dan *dipuja*. Kehadirannya yang begitu cepat membutuhkan eksistensi 'tau' sebagai makhluk yang berbudaya. Implikasinya, melahirkan konflik kekerasan yang semakin mempertegas bahwa didalam paradigma kita, telah tertanam ideology kapital yang telah di konstruksi oleh narasi kebuayaan industrial. Sebuah narasi kapital yang menjadikan stimulus manusia dalam menghilangkan falsafah dan kearifan budaya, yang menurut menurut konsepsi Makassar disebut: *Tau tena pannaggalana* (orang yang tidak memiliki tempat berpegang).

Harus diakui bahwa masyarakat Sulawesi Selatan senantiasa di-identik-an dengan konflik kekerasan, anarkisme dan tawuran, seolah-olah pencitraan tersebut menjadi energi cultural bagi sebagian besar masyarakat kita, baik dalam struktur pemerintahan, sistem politik, dunia pendidikan dan terus mengakar sampai pada masyarakat luas. Pergeseran makna 'tau' kini

berubah menjadi situasi '*mappakatau-tau*' (kondisi yang menakutkan). Jika kita bercermin dalam perjalanan *hiestoris*, manusia Bugis Makassar tidak mungkin bisa mencapai peradaban tinggi di masa lampau jika hanya mengandalkan karakter: kasar, temperamental dan emosional. Tapi peradaban tinggi tersebut dicapai dengan pengejawantahan prinsip-prinsip '*pangngadereng*' sebagai sebuah pranata sosial dimasa lampau, dimana termaktub didalamnya terdapat sistem nilai yang disebut: *Adak* (adat kebiasaan), *Rapang* (persamaan hukum), *Bicara* (undang-undang), *Wari* (pelapisan dan status sosial) dan *sarak* (syariat).

Simplifikasi diatas tentunya menghantarkan kira untuk kembali menakar sistem kebudayaan saat ini yang semakin menakutkan (*mappakatau-tau*), kriminalitas dan ketidakadilan menjadi sesuatu yang lumrah dalam fenomena sosial saat ini, bahkan nyaris menjadi bagian dari gaya hidup (*life style*). Selanjutnya dalam lingkup geografis, lahan publik kini telah di persempit berdasarkan pertukaran dan kompleksitas ekonomi. Setelah karebosi di rampas oleh sebuah narasi kapital dengan penguatan regulasi yang kokoh, selanjutnya Benteng Somba Opu mendapat giliran dalam mewujudkan program ekonomi makro bangsa ini. Tidak menutup kemungkinan lahan publik yang lain berangsur-angsur akan hilang ditelan percepatan ekonomi kapital, yang berangsur-angsur membentuk paradigma hidup yang semakin jauh dari konsep '*tau*'. Implementasi '*tau*' dalam konteks kekinian telah bergeser berdasarkan hasrat kapital yang berujung pada hilangnya konsep *sipakatau*. Masyarakat kini senantiasa menampilkan simbol-simbol modernitas yang dipandang sebagai salah

satu sarana efektif untuk menyebarkan cita-cita dan gaya hidup ke tempat-tempat lainnya, mempromosikan gaya hidup industrial, serta mengubah pola-pola konsumsi masyarakat. Konsep '*tau*' harus melihat *Modernisme* sebagai gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali falsafah tradisional, yang menyesuaikan dengan konsep antropologi, seni, sejarah, dan ilmu pengetahuan. '*Tau*' merupakan proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Bertambahnya ilmu pengetahuan merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan *tau baji*, '*tau tojeng*' (manusia baik, manusia yang sesungguhnya), menciptakan tatanan masyarakat yang berbudaya yang sejahtera dan berkeadilan. Tidak melihat kebudayaan dalam konteksnya pengusangan makna intrinsik, yang hanya dilihat dari sekumpulan cerita kuno yang tidak lagi memiliki korelasi dalam transformasi peradaban, apatah lagi bertindak secara pragmatis demi hasrat kapital yang justru mengubah falsafah '*tau*' menjadi perilaku '*mappakatau-tau*'.

## VII. Stimulus yang Ilusif

Permasalahan implementasi kearifan (*values*) kebudayaan pada dasarnya terdapat pada narasi hegemonik industrial terutama pada aspek perekonomian. Sehingga lambat laun masyarakat pasti akan terjebak dalam situasi keterpasaan kolektif. Keterpaksaan tersebut mengeras menjadi budaya baru yang kini hanya mampu berfantasi ditengah-tengah peradaban yang semakin keras, akibatnya terjadi kebiasaan-kebiasaan ilusif masyarakat yang menggiring pada polarisasi sistem nilai dan norma-norma sosial.

Ilusi biasa terjadi karena disebabkan oleh rasa takut dan panik, fanatisme yang berlebihan dan keresahan serta kegelisahan yang berkepanjangan. Jika dikaitkan dengan perkembangan *high modernity* saat ini, ilusi terjadi disebabkan oleh dua aspek: *Yang Pertama*: hilangnya kesadaran atas eksistensi diri dalam perkembangan lingkungan sosial. Misalnya, rasa takut jika tidak lagi mampu bersolek, berbaur dengan kehidupan hedonis, pergaulan bebas sampai pada rasa takut karena tidak mampu lagi menunjukkan keistimewaan dan kelebihan material. Hal tersebut tidak luput pula dari perilaku para elit kita yang korupsi secara berjamaah. Mengapa tidak, implikasi kompetisi perebutan kekuasaan tidak terlepas dari hadirnya jiwa ilusif yang senantiasa takut teralienasi dalam kekuasaan dan jabatan, jika perlu anak dan istri pun harus menjadi jembatan estafet kekuasaan selanjutnya. *Yang Kedua*: Kegelisahan atas penghasilan perekonomian yang semakin terpuruk. Kemiskinan dan pengangguran yang semakin membengkak pada ruang dan waktu memberikan peluang terciptanya keterpaksaan perilaku kekerasan, penipuan, pelacuran dan penggadaian harga diri. Bentuk kriminalitas sosial senantiasa meningkat seiring dengan terbentuknya fantasi dan ilusi masyarakat yang meresahkan, kriminalitas yang cenderung makin impulsif dan "berkualitas".

Priode ilusi ini, tidak terlepas pula dari kompleksitas peradaban yang serba instant. Dengan ketersediaan produksi industri, seolah-olah priode ini menuntut menghasilkan sesuatu yang baru dalam perkembangan sosial dengan didasari oleh fantasi dan sugesti. Kebutuhan masyarakat yang dimanja oleh narasi teknologi-informasi, membentuk ilusi gagasan yang

kemudian merebak secara irrasional, sehingga etika dan norma hiduppun juga terkadang irrasional. Kebohongan atas identitas melalui jejaring sosial berangsur-angsur mengeras menjadi karakter pembohongan atas sikap dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Bagaimana cara dan gaya kebohongan penegak/aparat hukum dalam memainkan materi-materi hukum demi konspirasi dan kepentingan kekuasaan, bagaimana kebohongan para pemimpin dalam memberikan kesenangan semu kepada masyarakat, bagaimana pemuda-pemudi kita melakukan kebohongan atas identitas dirinya demi hasrat dan kesenangan, selanjutnya bagaimana masyarakat kita melakukan kebohongan atas kesadarannya melebur dalam bentuk kehidupan konsumtifis. Tentunya narasi ini menuntut kita untuk meletakkan kembali tata nilai kearifan manusia yang sebenar-benarnya, membentuk sedini mungkin generasi kritis dan bermoral terhadap percepatan arus teknologi-informasi, sampai pada akhirnya mentalitas masyarakat siap menerima perkembangan informasi yang lebih baik. Jangan sampai kita justru menjadi pengikut dalam memberikan kontribusi hadirnya priode ilusif yang semakin '*liar*'. Olehnya, penegasan kembali atas identitas kebudayaan harus dimulai dari regulasi pembangunan dan kepemimpinan yang berangsur-angsur kepada pembangunan karakter kearifan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Salahsatu metode penyadaran wasiat kebudayaan yang sudah mulai hilang adalah mengangkat kembali falsafah dan nilai-nilai esensi kebudayaan dengan menggunakan pendekatan ontologis, pendekatan mitis dan pendekatan fungsional, agar manuskrip lontara tidak lagi terseret lebih jauh dalam kekuatan naskah kapital.

## VIII. PENUTUP

### Membuka Kesadaran Sosial

Menurut Antonio Gramsci bahwa penjajahan saat ini tidak dilakukan dengan kasat mata melalui pemaksaan secara fisik dan senjata, akan tetapi dilakukan melalui penjajahan pemikiran, dimana pihak yang terjajah “menikmati” penjajahan tersebut. Sedangkan teori orientalisme Edward W. Said menyebutnya bahwa timur saat ini dikepung dari segala arah dengan pemikiran dan ekspansi budaya barat yang diperteguh oleh media, melalui bidang akademik, politik dan terlebih lagi dari segi ekonomi. Cita rasa, selera, gaya hidup, dan bahkan pemikiran masyarakat timur diubah sedemikian rupa sehingga mereka tercerabut dari akar budayanya, serta mengikuti budaya yang diimpor dari barat. Masyarakat timur dipasung agar mereka menganggap bahwa budaya dan peradaban timur terbelakang dan peradaban barat adalah peradaban yang lebih tinggi - modern yang harus diikuti. Maka tak pelak lagi dis-orientasi pembangunan peradaban timurpun terjadi karena paradigma yang digunakan tidak berbasis pada realitas. Usaha untuk membutakan masyarakat timur dari kondisi realitas yang mereka hadapi dilakukan sedemikian rupa.

Dalam tulisan ini, saya tidak menjustifikasi bahwa progresifitas peradaban adalah kesalahan budaya yang harus dihindari. Namun terlebih pada sejauhmana transformasi budaya tersebut mengedepankan sistem nilai dan norma-norma sosial yang berlandaskan identitas kearifan budaya (*cultur values*). Setidaknya tayangan media yang banyak dijadikan sebagai jargon-jargon kehidupan masyarakat, harus lebih mengutamakan visualisasi

education-culture. Membuka kesadaran budaya melalui fakta sosial, yang kemudian berangsur-angsur menjadi kajian ontologism dalam meluruskan orientasi peradaban yang lebih baik, karena kebudayaan adalah idea perekat masyarakat dalam menemukan sistem nilai.

Kultur berfikir dan paradigma masyarakat kita yang masih diselubungi oleh (meminjam istilah Paulo Freire): kesadaran magis (*Magical Consciousness*) dan kesadaran naif (*Naival Consciousness*). Olehnya, paradigma tersebut harus diubah menjadi kesadaran kritis (*critical consciousness*). Perubahan kultur dan paradigma berfikir ini dimungkinkan jika komunitas masyarakat secara komunal mulai menggali kembali falsafah, sisi religius dan spiritualitas ketimuran sebagai sebuah wasiat kebudayaan harus dikembalikan. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan kembali dan membangkitkan budaya lokal kita sebagai *countervailing culture* (budaya tanding) untuk menandingi budaya konsumerisme yang sarat akan eksploitasi hegemoni, dan ekspansi kapital. Minimal, tidak hanya larut dalam transaksi budaya yang semakin ‘liar’, sedangkan didalamnya justru memiliki keterbatasan sosial yang sangat memprihatinkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa Putra, Heddy Shri, 2001. *Strukturalisme- Levis Strauss Mitos dan karya Sastra*, Galang Press. Yogyakarta.
- Amir piliang, Yasraf. 2011. *Melipat Dunia*, Matahari. Bandung.
- Atkins, Robert, 1990. *Art Speak: A Guide to Contemporary Ideas, Movements and Buzz Words*, New York: Abber Ville Press Publishers.
- Bachtiar, harsja. 1980. *Analisis kebudayaan*. Jakarta; depdikbud.
- Castelman, Riva, 1985. *American Impressions Prints Since Pollock*, New York: Alfred A. Knopf. Inc. Publisher.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Sussex: The Harvester Press
- Foucault, Michel. 1984. *The Subject and Power*. In *The Essential Work of Foucault*. New York: The New Press
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Kajian Sosio Historis*. Jakarta: Gramedia Dwiya sarana.
- Ihromi, T.O. 2000. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, IKAPI Jakarta.
- Kaplan, David. 2000. *Teori Budaya*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Keongtjaraningrat. 1999 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djembatan.
- Monoarto, Goenawan, dkk. 2003. *Seni Tradisional Sulawesi Selatan*, Makassar : Lamacca Press.
- Muh.Faisal, 2011. <http://sosbud.kompasiana.com/2010/12/16/politisasimasyarakatkesenian>. sabtu, 01 Januari 2010.
- Muh.Faisal, 2011. *Mengungkap Masa Depan Prilaku Konsumerisme di Indonesia*. Makassar: Media Panrita, Edisi: Juni 2010.
- Muh. Faisal, 2011. *Manipulasi Isu Yang Meresahkan*. Makassar: Harian Tribun-Timur, Edisi: 08 Februari 2011.
- Webster, Noah, 1980. *Webster's Twentieth Century Dictionary of English Language*, Cetakan ke-2, New York: William Collins Publishers, Inc.